

MODEL PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN POTENSI JAWA TIMUR MELALUI PERANAN *KEY SECTOR* KOTA/KABUPATEN

Anita Roosmawarni
icaroosma@yahoo.com

Program Studi Manajemen-Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari pembangunan nasional melalui upaya-upaya peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan terus meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata. Fenomena semakin ketatnya persaingan di era globalisasi, seperti EAC memaksa masing-masing pemerintah daerah Jawa Timur agar mampu mengembangkan potensi wilayahnya dan menerapkan strategi ekonomi yang baik sehingga mampu bersaing pada pasar global. Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik daerah (*endogenous development*), dengan memanfaatkan potensi-potensi sumberdaya lokal. Identifikasi sektor ekonomi yang potensial (*key sector*) menjadi kebutuhan bagi optimalisasi proses dan keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah sehingga mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di samping itu dalam penelitian ini dikembangkan sebuah model untuk memetakan potensi masing-masing kota/kabupaten melalui pendekatan tipologi Klassen, dengan harapan peta ini dapat dijadikan kompas bagi arah dan tujuan pembangunan Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan pemetaan potensi daerah melalui tipologi Klassen

Kata kunci : LQ, MRP, Tipologi Klassen

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari pembangunan nasional melalui upaya-upaya peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan terus meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata. Fenomena semakin ketatnya persaingan di era globalisasi, seperti AEC memaksa masing-masing pemerintah daerah Jawa Timur agar mampu mengembangkan potensi wilayahnya dan menerapkan strategi ekonomi yang baik sehingga mampu bersaing pada pasar global. Potensi sumber daya alam yang banyak tersedia di Jawa Timur merupakan salah satu modal dalam meningkatkan

perekonomian daerah. Dilihat dari kondisi alam, sektor pertanian masih menjadi gantungan hidup masyarakat di Provinsi Jawa Timur, meskipun peranannya berangsur-angsur tergeser oleh sektor industri pengolahan. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah bisa dilihat dari beberapa indikator yang lazim digunakan, diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian dan ukuran kemajuan suatu daerah, di samping tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan, pendapatan per kapita, dan pergeseran struktur ekonomi.

Seiring dengan otonomi daerah, maka kewenangan yang dimiliki daerah dalam mengelola segala bentuk sumber

daya dan pembiayaan, diharapkan akan mampu memberi dampak yang positif bagi kemajuan perekonomian daerah serta tercipta peningkatan pembangunan daerah secara optimal. Pembangunan daerah akan memanfaatkan aspek-aspek yang secara ekonomi berpotensi dikembangkan. Secara harfiah, potensi ekonomi dalam kerangka pembangunan daerah diartikan sebagai kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan di bidang ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Potensi ekonomi daerah dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis daerah yang dekat dengan sarana dan prasarana. Penggalan segala potensi sangat penting dalam rangka mengembangkan kemandirian kabupaten/kota.

Kegiatan ekonomi nasional sebagian besar berpusat di Pulau Jawa. Hal ini tampak dari nilai tambah yang dihasilkan, melalui indikator PDB, dimana PDB nasional merupakan sumbangan beberapa sektor di seluruh wilayah Indonesia yang dihitung secara nasional. Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur secara kumulatif (Januari – Juni 2015) mencapai 5,22 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Banten di Pulau Jawa dan lebih tinggi 0,52 poin dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (4,70 persen). Dengan begitu, Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap 33 Provinsi (Nasional) sebesar 14,51 persen seperti diilustrasikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.1.
Kondisi Perekonomian Jawa Timur dan 5 Provinsi se-Jawa
Tahun Dasar 2010

Indikator	2011	2012	2013	2014	Semi 2015
Pertumbuhan Ekonomi (%) (c to c)					
Jawa Timur	6,44	6,64	6,08	5,86	5,22
DKI Jakarta	6,73	6,53	6,11	5,95	5,11
Jawa Barat	6,51	6,28	6,06	5,07	4,87
Jawa Tengah	6,03	6,34	5,81	5,42	5,17
DKI Yogyakarta	5,17	5,32	5,40	5,18	4,44
Banten	6,38	6,15	5,86	5,47	5,34
Nasional	6,35	6,23	5,78	5,02	4,70
Kontribusi PDRB Terhadap Nasional (%)					
Jawa Timur	14,67	14,87	14,99	14,16	14,51
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
Jawa Timur	23,37	26,27	29,62	39,90
Nasional	30,60	33,50	36,50	41,80

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menduduki peringkat kedua sebagai provinsi yang mempunyai porsi besar dalam PDB nasional, sehingga apabila pengelolaan dan pemberdayaan sektoral di Provinsi Jawa Timur dapat dikelola secara efisien dan efektif, maka akan membawa dampak besar terhadap peningkatan PDB secara nasional. Capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak lepas dari berbagai

kebijakan dan kemudahan yang diberikan pemerintah daerah. Prestasi ini juga merupakan buah kerja keras pelaku ekonomi dalam menyukseskan program *pro growth*, *pro poor*, dan *pro job* yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang luas sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Rumusan Masalah

1. Sektor-sektor ekonomi apa sajakah yang menjadi basis untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimanakah pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang identifikasi terhadap sektor basis yang pernah dilakukan beberapa peneliti, dengan menggunakan berbagai pendekatan alat analisis yang berbeda-beda, yaitu :

- a) Zulfa dan Santoso (2013), mengkaji Pola Keterkaitan Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Sektor Unggulannya. Melalui analisis SLQ (*Static Location Quotient*) dan DLQ (*Dynamic Location Quotient*), maka didapat hasil bahwa sektor unggulan Jawa Timur meliputi; (1) sektor pertanian, (2) sektor industri pengolahan dan (3) sektor perdagangan, hotel & restoran. Untuk melihat keterkaitan antar wilayahnya maka tiga sektor unggulan tersebut dianalisis kembali melalui *Spatial Autocorrelation*, dimana hasilnya menunjukkan rendahnya tingkat keterkaitan wilayah Jawa Timur. Keterkaitan yang terjadi hanya terdapat pada sektor pertanian dan sektor industri. Oleh karena itu, pola keterkaitan wilayah yang ditunjukkan pun hanya terdapat di beberapa kawasan saja. Artinya, masih sedikit wilayah kabupaten/kota yang memiliki hubungan keterkaitan wilayah menurut sektor unggulannya
- b) Roosmawarni dan Soekarnoto (2011) melalui kajian empiris : Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Struktural Di Jawa Timur 2000-2010, menunjukkan bahwa sektor jasa merupakan sektor yang menjadi basis di hampir 30 kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor bangunan cenderung mengalami perlambatan sebaliknya semua sektor tersier yang meliputi : sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan sektor jasa cenderung mengalami pertumbuhan yang positif. Perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang terjadi di 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis *shift share* menunjukkan bahwa Jawa Timur mengalami transformasi struktural yang ditandai menurunnya peranan/*share* sektor pertanian, dan semakin meningkatnya peranan sektor jasa. Kondisi ini sekaligus bertentangan dengan teori Kuznets yang menyatakan bahwa proses transformasi struktural ditandai dengan bergesernya peranan sektor pertanian ke sektor industri manufaktur, dan selanjutnya ke sektor jasa.

Landasan Teori

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Djojohadikusumo (1994:28) berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hakikat pembangunan ekonomi regional adalah pelaksanaan dari pembangunan ekonomi nasional pada wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan fisik, sosial ekonomi regional tersebut, serta harus didasarkan pada peraturan yang berlaku. Glasson (1977) dalam Suparta (2009:32), pembangunan ekonomi daerah (*region*), erat kaitannya dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah serta adanya keterkaitan (*linkage*) kegiatan ekonomi antar daerah sekitarnya. Potensi ekonomi maupun karakteristik yang dimiliki suatu daerah akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain.

Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional. Lebih lanjut model ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah atas dua sektor, yaitu:

1. sektor basis (*key sector*), yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri.
2. sektor non basis, yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar daerah itu sendiri.

Analisis basis ekonomi berkenaan erat dengan identifikasi pendapatan basis. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang dan jasa di wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya meningkatkan kenaikan volume kegiatan non-basis. Adisasmita (2008 : 28).

Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat menolong perekonomian suatu daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan riil per kapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan usaha di daerah tersebut (Soeparmoko, 2002:21)

Potensi ekonomi suatu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena masing-masing daerah mempunyai ciri-ciri khas dan karakteristik yang menempel sesuai dengan sumberdaya manusia, struktur alam, dan letak geografisnya. Namun potensi ekonomi daerah merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi, industri, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar bagi produk-produk industri, pertanian, dan jasa. Potensi ekonomi daerah juga akan menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kemampuannya dalam penyerapan investasi, tenaga kerja, barang, jasa, dan tabungan (Isyandi, 2008:10).

Spesialisasi Perekonomian

Perekonomian suatu wilayah dikatakan terspesialisasi jika suatu wilayah memprioritaskan pengembangan satu sektor ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan sektor tersebut (Muzamil, 2001:38). Pengembangan sektor prioritas tersebut dapat dilakukan melalui investasi dan peningkatan sumber daya manusia. Spesialisasi dalam perekonomian merupakan permasalahan yang cukup penting dalam rangka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dikatakan, jika suatu wilayah memiliki spesialisasi pada sektor-sektor tertentu maka wilayah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif dari spesialisasi sektor tersebut (Soepono,1993:41). Pandangan beberapa ahli ekonomi mulai memperhitungkan efek dari spesialisasi terhadap perekonomian suatu wilayah. Menurut Kuncoro (2002:43), salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah adalah melalui proses pertukaran komoditas antar daerah. Hal ini

dapat ditempuh melalui penciptaan spesialisasi antar daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitatif, yang memberikan gambaran secara umum dengan pokok bahasan yang diteliti dalam bentuk data atau angka yang kemudian dianalisis, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan dalam bentuk uraian, tentang kondisi sektor-sektor ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumenter (*documentary study*) yaitu menghimpun berbagai data dan informasi yang diterbitkan oleh lembaga, dinas dan instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik, hasil penelusuran penelitian terdahulu, serta media massa. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2004 : 127). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berkala (*time series*) dengan periode penelitian dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Peubah yang akan diamati, diukur, dan dianalisis dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Pendapatan PDRB merupakan gabungan kontribusi dari sektor-sektor perekonomian. Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2010, lapangan usaha/sektor ekonomi terbagi menjadi 17 sektor : 1) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 2) sektor pertambangan dan penggalian, 3) sektor industri pengolahan, 4) sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es, 5) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, 6) sektor konstruksi, 7) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 8) sektor

transportasi dan pergudangan, 9) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, 10) sektor informasi dan komunikasi, 11) sektor jasa keuangan dan asuransi, 12) sektor real estate, 13) sektor jasa perusahaan, 14) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, 15) sektor jasa pendidikan, 16) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan 17) sektor jasa lainnya.

Teknik Analisis Data

Location Quotiont (LQ) index

$$LQ = \frac{X_r / RV_r}{X_n / RV_n}$$

Keterangan :

X_r : PDRB sektor i pada daerah kota/kabupaten

RV_r : total PDRB daerah kota/kabupaten

X_n : PDRB sektor i pada Provinsi Jawa Timur

RV_n : total PDRB Provinsi Jawa Timur

Kriteria pengukuran nilai LQ :

$LQ > 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat provinsi.

$LQ < 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat provinsi.

$LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi.

Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Dalam analisis ini terdapat dua rasio pertumbuhan yaitu :

1. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (Jawa Timur) (RPR)

$$RPR = \frac{\Delta E_{iR} / \Delta E_{iR(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}}$$

yaitu : perbandingan antara laju pertumbuhan sektor i di Jawa Timur dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) Jawa Timur

2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (kota/kabupaten di Jawa Timur)(RPS).

$$RPS = \frac{\frac{\Delta E_{ij}}{\Delta E_{iR(t)}}}{\frac{\Delta E_R}{E_{R(t)}}}$$

yaitu : perbandingan antara laju pertumbuhan sektor i di kota/kabupaten di Jawa Timur dengan laju pertumbuhan kegiatan i di Jawa Timur, dimana :

ΔE_{ij} = Perubahan nilai output sektor i di wilayah studi (kota/kabupaten di Jawa Timur) pada periode waktu t dan t + n

n = Jumlah tahun antara dua periode

ΔE_{iR} = Perubahan nilai output sektor i di wilayah referensi.(Jawa Timur)

E_{iR} = Nilai output sektor i di wilayah referensi. (Jawa Timur)

ΔE_R = Perubahan PDRB di wilayah referensi. (Jawa Timur)

E_R = PDRB di wilayah referensi. (Jawa Timur)

E_{ij} = Nilai output sektor i di wilayah studi (kota/kabupaten di Jawa Timur).

(Maulana Yusuf, 1999 : 223)

Jika nilai RPR > 1 maka RPR dikatakan (+), artinya : RPR (+) menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor i di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur. Jika nilai RPR < 1 maka RPR dikatakan (-), artinya : RPR (-) menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor i di Provinsi Jawa Timur lebih rendah dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur.

Jika nilai RPS > 1 maka RPS dikatakan (+), artinya : RPS (+) menunjukkan pertumbuhan sektor i kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor i Provinsi Jawa Timur. Namun jika nilai RPS < 1 maka

RPS dikatakan (-), artinya : RPS (-) menunjukkan pertumbuhan sektor i kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur lebih

Melalui analisis MRP dan tipologi Klassen akan diperoleh nilai riil dan nilai nominal dimana kombinasi atas keduanya akan diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dengan menggunakan klasifikasi sebagai berikut :

1. Cluster 1, yaitu nilai RPR (+) dan RPS (+) berarti sektor i di tingkat Provinsi Jawa Timur mempunyai pertumbuhan menonjol demikian pula di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sektor i ini disebut sebagai dominan pertumbuhan.

2. Cluster 2, yaitu nilai RPR (+) dan RPS (-) berarti sektor i di tingkat Provinsi Jawa Timur mempunyai pertumbuhan menonjol, akan tetapi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur belum menonjol.

3. Cluster 3, yaitu nilai RPR (-) dan RPS (+) berarti sektor i di tingkat Provinsi Jawa Timur pertumbuhannya tidak menonjol akan tetapi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sektor i tersebut menonjol. Oleh karena itu sektor i tersebut merupakan sektor potensial yang dapat dikembangkan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

4. Cluster 4, yaitu nilai RPR (-) dan RPS (-) berarti sektor i baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat kabupaten/kota mempunyai pertumbuhan yang rendah.

5. Analisis Dan Pembahasan Hasil Penelitian

5.1. Location Quotient (LQ)

Kota/Kab.	LQ0 1	LQ0 2	LQ0 3	LQ0 4	LQ0 5	LQ06	LQ0 7	LQ08	LQ0 9	LQ1 0	LQ1 1	LQ1 2	LQ1 3	LQ1 4	LQ1 5	LQ 16	LQ 17
01 Kab. Pacitan	2.23	1.22	0.24	0.10	0.89	1.55	0.90	0.76	0.38	1.18	0.73	0.96	0.36	1.94	1.83	1.49	1.85
02 Kab. Ponorogo	2.39	0.51	0.23	0.24	1.03	0.99	0.89	0.55	0.55	1.45	1.20	1.48	0.56	2.34	3.05	1.31	1.42
03 Kab. Trenggalek	2.22	1.36	0.49	0.12	0.57	0.79	0.92	0.47	0.35	1.05	1.01	1.22	0.31	1.89	1.72	1.36	1.88
04 Kab. Tulungagung	1.62	0.80	0.71	0.12	0.89	0.98	1.15	0.70	0.36	1.16	0.88	1.23	0.47	1.42	1.58	1.69	0.91
05 Kab. Blitar	2.63	0.87	0.45	0.20	0.37	0.96	0.94	0.43	0.18	1.12	0.86	1.14	0.47	1.49	1.57	1.24	1.00
06 Kab. Kediri	2.01	0.33	0.66	0.20	0.55	1.02	1.09	0.61	0.26	1.00	0.72	1.19	0.38	1.63	1.87	1.28	1.23
07 Kab. Malang	1.41	0.44	1.01	0.25	0.99	1.26	1.06	0.37	0.65	0.87	0.64	0.85	0.46	0.80	0.91	0.91	1.40
08 Kab. Lumajang	3.03	0.85	0.65	0.14	0.62	0.74	0.71	0.60	0.22	0.66	0.64	0.93	0.41	1.36	0.94	1.07	1.07
09 Kab. Jember	2.40	1.04	0.71	0.13	0.61	0.70	0.66	0.52	0.42	1.25	0.91	0.81	0.40	1.39	1.97	1.21	0.79
10 Kab. Banyuwangi	2.67	1.72	0.40	0.14	0.67	1.18	0.75	1.00	0.44	0.93	0.71	0.88	0.30	0.96	1.25	0.57	0.79
11 Kab. Bondowoso	2.54	0.45	0.75	0.13	0.78	0.85	0.80	0.24	0.12	1.07	1.13	0.71	0.46	1.44	1.29	1.17	1.21
12 Kab. Situbondo	2.66	0.44	0.53	0.19	1.38	0.85	0.83	0.82	0.32	1.11	1.13	0.88	0.54	1.47	1.48	1.43	1.45
13 Kab. Probolinggo	2.94	0.52	0.73	2.51	1.15	0.75	0.66	0.29	0.28	0.58	0.73	1.40	0.41	1.35	0.96	0.93	1.31
14 Kab. Pasuruan	0.56	0.12	1.93	2.67	0.36	1.40	0.56	0.20	0.64	0.60	0.31	0.44	0.13	0.51	0.27	0.24	0.76
15 Kab. Sidoarjo	0.18	0.03	1.71	2.84	0.79	1.00	0.86	3.01	0.64	0.77	0.47	0.58	0.21	0.79	0.45	0.52	0.27
16 Kab. Mojokerto	0.67	0.20	1.82	0.19	0.73	0.97	0.60	0.40	0.36	1.16	0.58	0.93	0.20	1.06	0.51	0.61	0.67
17 Kab. Jombang	1.61	0.14	0.72	0.23	0.94	0.99	1.23	0.42	0.41	1.29	0.91	1.15	0.39	1.54	2.03	1.27	1.11
18 Kab. Nganjuk	2.63	0.39	0.45	0.14	1.14	0.98	0.96	0.48	0.35	0.91	0.91	1.02	0.44	2.07	1.37	0.93	1.98
19 Kab. Madiun	2.63	0.23	0.34	0.25	1.66	1.15	0.83	0.51	0.45	1.35	1.08	1.03	0.43	2.50	1.70	1.42	1.65
20 Kab. Magetan	2.55	0.33	0.34	0.17	2.33	0.85	0.79	0.47	0.78	1.33	0.98	0.84	0.43	3.48	1.60	1.31	2.20
21 Kab. Ngawi	2.85	0.26	0.29	0.25	1.17	0.84	0.88	0.43	0.48	1.35	0.94	0.89	0.45	2.47	2.15	1.34	1.52
22 Kab. Bojonegoro	1.08	9.48	0.21	0.08	0.37	0.74	0.45	0.28	0.16	1.05	0.51	0.66	0.17	1.61	0.42	0.64	0.59
23 Kab. Tuban	1.45	1.74	1.05	0.32	0.62	1.43	0.71	0.19	0.16	0.99	0.76	0.78	0.25	1.00	0.60	0.75	0.79
24 Kab. Lamongan	2.93	0.25	0.24	0.19	1.08	1.21	1.03	0.26	0.27	1.47	0.80	1.19	0.37	1.80	1.00	1.30	1.33
25 Kab. Gresik	0.55	2.32	1.67	1.43	0.62	0.88	0.62	0.76	0.22	0.76	0.43	0.74	0.34	0.50	0.32	0.59	0.19
26 Kab. Bangkalan	1.50	8.29	0.07	0.09	0.61	0.89	0.61	0.40	0.16	0.73	0.56	0.52	0.24	1.69	1.17	0.48	0.42
27 Kab. Sampang	2.38	5.26	0.12	0.10	0.70	0.86	0.77	0.29	0.07	0.83	0.46	0.72	0.35	1.78	1.01	0.75	0.61
28 Kab. Pamekasan	2.62	0.74	0.21	0.16	0.91	1.10	1.07	0.53	0.12	1.27	0.75	1.12	0.52	3.00	1.76	1.19	0.85
29 Kab. Sumenep	2.73	5.42	0.17	0.09	0.47	0.68	0.57	0.34	0.12	0.86	0.66	0.54	0.23	1.32	0.84	0.51	0.44
30 Kota Kediri	0.02	0.00	2.78	0.03	0.22	0.20	0.53	0.14	0.29	0.43	0.37	0.27	0.25	0.16	0.29	0.27	0.24

31	Kota Blitar	0.27	0.00	0.32	0.20	1.95	0.79	1.29	1.39	0.93	2.35	4.04	2.34	1.13	2.99	2.52	3.10	3.69
32	Kota Malang	0.02	0.02	0.93	0.10	2.04	1.30	1.68	0.86	0.83	0.84	1.04	0.85	0.91	0.67	2.81	3.77	2.19
33	Kota Probolinggo	0.55	0.00	0.58	0.32	2.49	0.65	1.30	4.78	0.61	1.05	2.39	1.78	0.85	2.15	1.85	1.39	2.50
34	Kota Pasuruan	0.21	0.01	0.71	0.23	2.91	0.67	1.54	2.02	0.84	1.68	2.97	1.69	0.78	1.97	1.59	1.52	2.07
35	Kota Mojokerto	0.05	0.00	0.37	0.25	1.50	1.21	1.63	0.96	1.26	2.61	3.04	1.73	0.97	1.96	1.73	1.89	2.58
36	Kota Madiun	0.08	0.01	0.59	0.20	2.29	0.72	1.32	1.01	0.97	2.92	3.66	1.51	0.92	1.51	2.91	2.02	2.66
37	Kota Surabaya	0.01	0.00	0.66	1.64	1.62	1.12	1.59	1.70	2.83	1.20	1.90	1.60	3.08	0.58	0.92	1.22	1.05
38	Kota Batu	1.29	0.04	0.15	0.14	1.94	1.04	1.04	0.47	2.02	1.43	1.54	1.73	0.65	1.12	1.53	1.34	11.05

Keterangan :

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan | 9 | sektor penyediaan akomodasi dan makan minum |
| 2 | sektor pertambangan dan penggalian | 10 | sektor informasi dan komunikasi |
| 3 | sektor industri pengolahan | 11 | sektor jasa keuangan dan asuransi |
| 4 | sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es | 12 | sektor real estate |
| 5 | sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang | 13 | sektor jasa perusahaan |
| 6 | sektor konstruksi | 14 | sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib |
| 7 | sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 15 | sektor jasa pendidikan |
| 8 | sektor transportasi dan pergudangan | 16 | sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial |
| | | 17 | sektor jasa lainnya |

5.2. Model Rasio Pertumbuhan

NILAI RPR TIAP SEKTOR																	
	RPR 1	RPR 2	RPR 3	RPR 4	RPR 5	RPR 6	RPR 7	RPR 8	RPR 9	RPR 10	RPR 11	RPR 12	RPR 13	RPR 14	RPR 15	RPR 16	RPR 17
Rata-rata	0.65	0.50	0.95	0.04	0.63	1.14	1.17	1.19	1.23	1.55	1.60	1.18	0.89	0.38	1.13	1.65	0.77
Notifikasi	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-

NILAI RPS TIAP SEKTOR																		
Kota/Kab.	RPS 1	RPS 2	RPS 3	RPS 4	RPS 5	RPS 6	RPS 7	RPS 8	RPS 9	RPS 10	RPS 11	RPS 12	RPS 13	RPS 14	RPS 15	RPS 16	RPS 17	
01 Kab. Pacitan	0.70	0.54	0.70	0.98	1.15	1.12	1.38	1.55	1.61	1.41	1.71	1.25	0.97	0.34	1.48	1.91	1.04	
	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
02 Kab. Ponorogo	0.35	0.32	1.09	0.89	0.21	1.10	1.64	1.48	1.59	1.97	1.70	1.45	1.05	0.25	1.39	1.93	0.65	
	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	
03 Kab. Trenggalek	0.79	0.36	1.02	0.87	1.07	1.29	1.00	1.44	1.40	2.03	1.62	1.34	1.15	0.42	1.39	1.90	0.99	
	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	
04 Kab. Tulungagung	0.64	0.45	0.91	1.03	0.67	1.09	1.24	1.41	1.44	1.64	1.79	1.25	0.88	0.22	1.24	1.86	0.67	
	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	
05 Kab. Blitar	0.65	0.77	0.81	1.02	0.34	1.25	1.45	1.08	1.41	1.61	2.65	1.13	0.82	0.43	1.17	1.77	0.99	
	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	
06 Kab. Kediri	0.68	0.47	0.88	0.78	0.94	1.20	1.26	1.53	1.17	1.80	1.49	1.24	1.16	0.42	0.96	1.55	1.07	
	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	
07 Kab. Malang	0.70	0.37	1.00	0.96	0.82	1.38	0.97	1.41	1.05	1.64	1.57	0.96	1.13	0.43	1.24	1.62	0.73	
	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	
08 Kab. Lumajang	0.69	0.38	1.11	0.83	0.81	1.18	1.61	1.40	1.50	1.73	1.73	1.25	0.97	0.49	1.23	1.91	0.80	
	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	

09	Kab. Jember	0.71	0.52	1.08	1.12	0.89	1.32	1.05	1.43	1.16	1.52	1.64	1.36	1.41	0.66	1.37	1.95	1.05
		-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
10	Kab. Banyuwangi	0.82	0.57	0.95	0.77	0.82	1.30	1.37	1.20	1.36	1.35	1.31	1.21	1.03	0.42	1.21	1.25	0.81
		-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
11	Kab. Bondowoso	0.59	0.39	0.87	0.91	0.79	1.48	1.52	1.65	1.58	1.72	1.63	1.31	1.41	0.51	1.49	1.63	0.88
		-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-
12	Kab. Situbondo	0.64	0.28	1.16	1.11	0.65	1.16	1.17	1.52	1.42	1.46	1.87	1.68	1.00	0.73	1.42	1.56	0.74
		-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-
13	Kab. Probolinggo	0.82	0.50	1.17	1.32	0.65	1.27	1.15	0.82	0.90	1.41	1.29	1.17	0.99	0.42	1.29	1.91	0.84
		-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-
14	Kab. Pasuruan	0.59	0.26	1.10	0.29	0.54	1.02	0.87	1.19	1.12	1.36	1.70	1.08	0.87	0.26	1.18	1.73	0.43
		-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-
15	Kab. Sidoarjo	0.72	0.42	0.91	0.79	0.74	0.97	1.29	1.04	1.15	1.46	1.54	0.83	0.77	0.41	1.14	1.41	0.61
		-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-
16	Kab. Mojokerto	0.51	0.49	0.98	0.97	0.40	1.36	0.87	1.41	1.40	1.66	1.54	1.27	1.19	0.33	1.02	1.46	0.68
		-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-
17	Kab. Jombang	0.42	0.41	0.80	0.78	0.63	1.00	1.44	0.66	1.35	1.86	2.08	1.51	0.96	0.47	0.95	2.15	0.97
		-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-
18	Kab. Nganjuk	0.49	0.80	0.90	0.94	0.51	1.19	1.78	1.24	1.29	1.57	1.72	1.19	0.97	0.61	1.13	1.58	1.12
		-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
19	Kab. Madiun	0.56	0.14	0.92	1.22	0.93	1.25	1.43	1.60	1.00	1.76	1.49	1.02	1.03	0.44	0.94	1.20	4.21
		-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
20	Kab. Magetan	0.68	0.36	0.93	1.39	0.72	1.11	1.40	1.54	1.52	1.97	1.96	1.19	1.15	0.30	0.95	1.64	1.07
		-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
21	Kab. Ngawi	0.81	0.44	0.90	1.32	0.85	1.03	1.37	1.25	1.28	1.61	1.52	0.93	1.08	0.26	1.16	1.66	0.89
		-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-
22	Kab. Bojonegoro	1.05	0.11	1.72	1.36	1.39	2.81	2.96	3.08	2.73	3.50	3.83	2.71	2.58	0.62	2.01	2.79	1.53
		+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
23	Kab. Tuban	0.85	1.27	0.99	1.25	0.88	0.55	1.26	1.69	1.37	1.34	1.74	1.54	1.26	0.30	1.46	1.78	1.01
		-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
24	Kab. Lamongan	0.86	0.61	1.13	0.99	0.53	0.73	1.39	1.10	1.19	1.13	1.47	1.48	0.77	0.45	1.21	1.85	0.75
		-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-
25	Kab. Gresik	0.73	0.41	1.02	1.35	0.77	1.22	1.43	0.98	1.28	1.49	1.40	1.00	0.89	0.51	1.03	1.57	0.77
		-	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-
26	Kab. Bangkalan	6.41	9.14	6.97	5.77	7.23	10.18	11.14	5.57	6.30	15.90	12.74	7.38	5.37	2.78	4.47	5.02	3.77
		+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
27	Kab. Sampang	13.94	52.80	21.02	10.27	14.91	24.50	33.20	37.82	34.35	35.22	32.10	29.24	26.40	6.10	29.75	31.95	21.09
		+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
28	Kab. Pamekasan	0.78	0.45	1.02	0.86	0.50	1.18	1.41	1.49	1.32	1.64	1.31	1.24	1.04	0.43	0.73	1.27	0.35
		-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-
29	Kab. Sumenep	0.48	1.68	0.77	0.63	0.65	0.85	1.28	0.81	1.05	1.52	1.48	0.97	0.77	0.36	1.04	1.32	0.71
		-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-
30	Kota Kediri	0.40	-	0.80	1.30	1.04	1.55	2.05	1.68	2.17	2.34	1.88	1.46	1.55	0.50	1.69	2.25	1.22
		-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
31	Kota Blitar	0.17	0.96	0.87	0.80	0.17	0.93	1.21	1.03	1.28	1.21	1.37	1.07	0.47	0.37	1.00	1.34	0.48
		-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-
32	Kota Malang	0.12	0.43	-	0.84	0.87	1.37	1.14	1.12	1.45	1.60	1.50	1.24	1.12	0.30	1.31	1.76	0.64
		-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-
33	Kota Probolinggo	0.03	-	0.94	0.71	0.60	1.31	1.24	0.93	1.49	1.65	1.40	1.18	0.71	0.31	1.03	1.43	0.50
		-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-
34	Kota Pasuruan	0.23	0.21	0.76	0.93	0.33	1.04	1.08	0.86	1.83	1.31	1.54	0.53	1.12	0.48	1.15	1.29	0.69

		-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-
35	Kota Mojokerto	0.08	-	0.75	1.14	-0.15	1.00	1.07	0.57	0.98	1.31	1.23	0.92	0.97	0.58	0.85	1.53	0.86
		-		-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-
36	Kota Madiun	0.20	0.60	0.89	0.89	0.52	1.01	1.00	1.06	1.12	1.26	1.34	1.08	0.91	0.24	0.92	1.29	0.62
		-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-
37	Kota Surabaya	0.68	0.40	0.97	-0.71	0.46	1.00	0.93	1.10	1.07	1.41	1.46	1.09	0.75	0.24	0.97	1.57	0.60
		-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-
38	Kota Batu	0.51	0.52	0.94	1.21	0.93	1.47	1.17	1.16	1.14	1.22	1.22	1.26	0.93	0.47	1.12	1.35	0.84
		-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai sektor tertentu yang menjadi basis bagi perekonomian daerah. Melalui pendekatan LQ (*Location Quotient*) terlihat jelas bahwasanya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib merupakan sektor basis di hampir seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dimana terdapat 30 kabupaten/kota yang memiliki nilai LQ > 1 selama periode penelitian.
2. Meskipun mengalami penurunan produktivas pada tahun 2013 sebesar 1,23%, akan tetapi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor basis dan unggulan Provinsi Jawa Timur. Terdapat 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki nilai LQ > 1 selama periode penelitian. Produksi padi memberikan kontribusi terbesar hasil tanaman pangan di Jawa Timur. Tak heran Provinsi Jawa Timur dikatakan sebagai lumbung padi setelah Provinsi Jawa Barat.
3. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang sangat dominan, dan diklasifikasikan dalam *cluster 1* : (a) sektor konstruksi, (b) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (c) sektor transportasi dan pergudangan, (d) sektor penyediaan akomodasi dan makan, (e) sektor informasi dan komunikasi, (f) sektor jasa keuangan dan asuransi, dan (g) sektor real estate. Dari ketujuh (7) sektor tersebut di atas

hanya sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa keuangan dan asuransi yang memiliki indeks RPR (+) dan RPS (+) di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

4. Terdapat 22 Kota/Kabupaten yang memiliki angka pertumbuhan yang memiliki indeks RPR (+) dan RPS (+) pada ketujuh sektor di atas, dan sisanya adalah kombinasi RPR (+) dan RPS (-) pada ketujuh sektor tersebut (*cluster II*)
5. Terdapat kurang lebih 8 sektor yang masih memiliki indeks RPR negatif (-) yang tersebar secara merata hampir di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sektor sektor tersebut adalah : (a) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, (b) sektor pertambangan dan penggalan, (c) sektor industri pengolahan, (d) sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es, (e) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, (f) sektor jasa perusahaan, (g) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan (h) sektor jasa lainnya.
6. Meskipun secara geografis Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya alam yang cukup potensial di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalan, akan tetapi laju pertumbuhan sektor-sektor tersebut masih sangat rendah. Terefleksi dari indeks RPR (-) dan RPS (-) yang terjadi secara merata hamper di seluruh wilayah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Saran

1. Daerah yang masuk dalam *cluster III* yang memiliki tingkat pertumbuhan

PDRB rata-rata di atas Provinsi Jawa Timur, sebaiknya lebih memprioritaskan program perencanaan daerah pada peningkatan pendapatan perkapitanya. Demikian pula bagi daerah-daerah yang masuk dalam *cluster IV* agar lebih memprioritaskan program perencanaan daerahnya pada pertumbuhan PDRB.

2. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral bagi perekonomian daerah, hendaknya lebih memprioritaskan sektor-sektor yang menjadi basis yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota, sehingga optimalisasi pengembangan sektor basis akan membawa dampak positif bagi sektor-sektor non basis. Meskipun demikian sektor-sektor yang lainnya tetap mendapat perhatian secara proporsional sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya, serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2015, *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2010-2014*
- _____, 2014, *Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur 2014*
- _____, 2014, *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2010-2014*, Buku 2, <http://www.bps.go.id>
- Blakely, Edward J, 1989, *Planning Local Economic Development : Theory and Practice*, Newbury Park, CA : Sage
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit : PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Isnowati, Sri, 2007, *Pengujian Hipotesis Kuznets Di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Volume XIV No 1
- Jhingan, M.L, 2003, *Ekonomika Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta UPP AMP YKPN
- _____, 2004, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Roosmawarni, Soekarnoto, 2011, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Struktural Di Jawa Timur 2000-2010*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.
- Soeparmoko, 2002. *Ekonomi Publuk untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Suhartono, 2011, *Struktur Ekonomi, Kesempatan Kerja Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume VII No 2 86-101
- Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekatan)*, Salemba Empat, Bandung.
- Tambunan, Tulus T.H, 2001, *Transformasi Ekonomi Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit : Salemba
- Tarigan, Robinson. 2003. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi (edisi revisi)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, Michael P and Stephen Smith, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan, Jakarta : PT Erlangga
- Yusuf, Maulana, 1999, *Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Analisis Alternatif Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota*, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Volume XI, VII No 2 219-233
- Zulha, Santoso, 2013, *Pola Keterkaitan Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Sektor Unggulannya*, Jurnal Teknik POMITS Vol.2 No.1, ISSN:2337-3539